

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
KABUPATEN LEMBATA**

Kevin Cafasus Duli V.L Wejak
NPP. 32.0658

*Asdaf Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Keuangan Publik
Email: 32.0658@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): This research is motivated by the suboptimal implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Lembata Regency. The main problems identified include technical system constraints, limited human resources (HR), minimal supporting infrastructure, and weak coordination between related parties. In fact, SIPD is expected to be the main instrument in realizing efficiency, transparency, and accountability in regional financial governance. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the application of SIPD in compiling the APBD in Lembata Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, direct observation, and documentation. Informants were selected through purposive and snowball sampling techniques from BAPELITBANGDA and BKAD Lembata Regency. The theory used is the Implementation of Richardus Eko Indrajit (2016), which includes three dimensions: Support Elements, Capacity Elements, and Value Elements. **Result:** The results of the study show that the implementation of SIPD is still not running optimally. The main obstacles lie in technical application disruptions, lack of understanding of operators in OPDs, and limited internet networks and technological devices. In addition, coordination between SKPDs is often not synchronized, causing delays in the preparation and submission of APBD documents. Efforts that have been made include technical training, assistance, and improvements to internal procedures, although the results have not been optimal. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the success of SIPD implementation is greatly influenced by three main elements in the Harvard JFK School e-government theory, namely support, capacity, and value. All three need to be strengthened so that SIPD can truly become an effective solution for regional financial management.

Keywords: SIPD, APBD, Regional Government, E-Government, Lembata Regency

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kendala teknis sistem, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antarpihak terkait. Padahal, SIPD diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling dari BAPELITBANGDA dan BKAD Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan adalah Implementasi dari Richardus Eko Indrajit (2016), yang mencakup tiga dimensi: Elemen *Support* (Pendukung), Elemen *Capacity* (Kapasitas), dan Elemen *Value* (Manfaat). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD masih belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada gangguan teknis aplikasi, kurangnya pemahaman operator di OPD, dan keterbatasan jaringan internet serta perangkat teknologi. Selain itu, koordinasi antar-SKPD sering tidak sinkron, menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan pengajuan dokumen APBD. Upaya yang telah dilakukan meliputi pelatihan teknis, pendampingan, serta pembenahan prosedur internal, meskipun hasilnya belum maksimal. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam teori *e-government Harvard JFK School*, yaitu dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai manfaat (*value*). Ketiganya perlu diperkuat agar SIPD benar-benar dapat menjadi solusi pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Kata kunci: SIPD, APBD, Pemerintah Daerah, *E-Government*, Kabupaten Lembata

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terjadinya akselerasi dan globalisasi yang mengubah cara hidup masyarakat, termasuk dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Dirgahayu et al., 2025). Hal ini tercermin dalam konsep *e-government*, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menyelenggarakan layanan publik secara efisien, transparan, dan efektif (Hartati et al., 2025). Salah satu bentuk implementasi *e-government* di Indonesia adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD dirancang untuk mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan administrasi pemerintahan daerah secara terintegrasi (I. K. Nasution et al., 2024).

SIPD memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta berbagai peraturan presiden dan peraturan menteri. Ruang lingkup SIPD mencakup proses perencanaan hingga penganggaran pembangunan daerah (I. K. Nasution et al., 2024). Tahapan pengelolaan data dalam SIPD dimulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga pemeriksaan data secara elektronik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Dengan sistem ini, diharapkan tata kelola keuangan daerah bisa dilakukan secara lebih modern, efisien, dan akuntabel (Selvia et al., 2024).

Electronic Government (disingkat *E-Government*) adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif (Riau et al., 2022). Sistem informasi (SI) di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan data secara efektif.

Namun, dalam praktiknya, penerapan SIPD di Kabupaten Lembata masih menghadapi banyak tantangan. Berdasarkan wawancara dengan aparat perencanaan daerah, ditemukan berbagai hambatan seperti kendala teknis (sistem sering down dan lambat), keterbatasan infrastruktur, perbedaan format dokumen antara sistem dan manual, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal. Selain itu, masih banyak operator perangkat daerah yang belum memahami sistem SIPD secara menyeluruh, dan beban kerja yang tinggi juga menjadi penghambat (Yamin et al., 2025).

Sejak menjadi daerah otonom tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Namun, kenyataannya, penerapan sistem elektronik seperti SIPD belum mampu mengatasi persoalan keterlambatan penyampaian dokumen anggaran kepada DPRD. Evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT dan KPK juga menunjukkan skor penilaian yang rendah, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA/PPAS dan RAPBD. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD belum dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena selama ini sebagian besar penelitian hanya berfokus pada pengaruh SIPD terhadap laporan keuangan atau kinerja OPD, bukan pada proses penerapan SIPD dalam penyusunan APBD secara langsung. Khusus di Kabupaten Lembata, belum ada penelitian yang mengkaji penerapan SIPD secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus tersebut dengan menggunakan teori keberhasilan *e-government* dari Harvard JFK School yang menekankan pada tiga elemen penting: *support*, *capacity*, dan *value*.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, serta mengevaluasi efektivitas sistem yang ada. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan berbasis elektronik yang lebih tepat waktu, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

I.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari berbagai sudut pandang, seperti efektivitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, serta implementasi teknis di berbagai daerah. Namun, sebagian besar dari penelitian tersebut belum secara spesifik meneliti bagaimana penerapan SIPD dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dari sisi strategi implementasi, hambatan teknis maupun non-teknis, serta upaya penyelesaiannya secara holistik di tingkat kabupaten.

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif membahas penerapan SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata. Padahal, Kabupaten Lembata sendiri menunjukkan sejumlah permasalahan serius, seperti keterlambatan penyampaian dokumen KUA/PPAS dan RAPBD kepada DPRD, rendahnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, serta lemahnya integrasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Hal ini menandakan adanya kesenjangan pengetahuan mengenai faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan penerapan SIPD dalam proses penganggaran daerah secara aktual.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan teoritis dari Harvard JFK School of Government mengenai keberhasilan implementasi *e-*

government yang mencakup aspek *support*, *capacity*, dan *value*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih mendalam serta rekomendasi kebijakan yang tepat dalam meningkatkan efektivitas penerapan SIPD, khususnya dalam mendukung proses penyusunan APBD di Kabupaten Lembata.

I.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Novianta (2021) yang judul “Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.” Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan SIPD digunakan dalam proses penyusunan dokumen anggaran di lingkup Pemerintah Kota Jambi. Penelitian tersebut mengkaji aspek-aspek teknis administratif penyusunan APBD dan pembiayaan daerah berdasarkan regulasi, seperti Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal ini, SIPD dipandang sebagai alat bantu dalam proses penginputan data dan penyusunan anggaran, dan belum menyentuh secara mendalam aspek keberhasilan implementasi maupun kendala substantif yang dihadapi oleh pemerintah daerah..

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” menitikberatkan pada proses implementasi SIPD dari sisi teknis dan administratif. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana sistem SIPD diterapkan dalam lingkup pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga penginputan anggaran daerah, serta melihat kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan SDM, dan adaptasi terhadap regulasi yang terus diperbarui. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif tanpa landasan teori implementasi tertentu, dan lebih banyak mengkaji bagaimana pelaksanaan sistem SIPD berjalan di lingkungan kerja birokrasi perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Sanny, Muhammad Hatta, Dayu Suhardi (2023) berjudul “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Penyusunan Anggaran di Kota Parepare” secara khusus mengkaji sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, maupun komitmen organisasi, dalam mengimplementasikan SIPD dalam penyusunan anggaran daerah. Penelitian ini berfokus pada tahap awal penerapan SIPD dan menggunakan pendekatan analisis kesiapan (*readiness analysis*) sebagai kerangka evaluatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kelancaran integrasi SIPD ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah..

Penelitian oleh Ade Ridwan Setiadi (2022) berjudul “*Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kota Bandung*” dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menelaah bagaimana penerapan SIPD dalam menyusun perencanaan anggaran pada salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini mengkaji aspek teknis pelaksanaan SIPD dalam satu unit organisasi, khususnya terkait proses perencanaan program dan penginputan data ke dalam sistem. Penekanannya terletak pada bagaimana perangkat daerah memahami, mengoperasikan, dan menyesuaikan diri dengan sistem SIPD dalam lingkup mikro (unit dinas), serta hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan penyesuaian nomenklatur program.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra (2021) di Kabupaten Nganjuk dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan

Dokumen RKPD” berfokus pada sejauh mana SIPD mampu mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara efektif. Penelitian ini menekankan aspek efektivitas sistem, seperti ketepatan waktu penyusunan, kemudahan akses data, integrasi antarsektor, serta kemampuan SIPD dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini melihat SIPD sebagai alat bantu teknis dalam proses perencanaan tahunan pemerintah daerah, dan cenderung menggunakan pendekatan evaluatif terhadap kualitas output perencanaan melalui SIPD.

I.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena menghadirkan analisis komprehensif terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata, dengan menggunakan kerangka teori implementasi *e-government* dari Harvard JFK School yang mencakup elemen *support*, *capacity*, dan *value*. Berbeda dengan penelitian Novianta (2021) di Kota Jambi yang hanya menitikberatkan pada prosedur teknis penyusunan APBD melalui SIPD tanpa pendekatan teoritis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga mengevaluasi tingkat keberhasilan dan hambatan implementasi SIPD secara mendalam.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian di Kota Parepare yang menyoroiti kesiapan awal pemerintah daerah dalam menerapkan SIPD (fase *pra-implementasi*), sementara fokus penelitian ini adalah pada fase *post-implementasi*, yakni bagaimana sistem berjalan dan dihadapi dalam praktik. Selain itu, penelitian di Kota Medan maupun Kota Bandung lebih bersifat sektoral dengan lingkup terbatas pada satu perangkat daerah, sedangkan penelitian ini bersifat lintas sektor dan mencakup beberapa OPD kunci dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran. Penelitian di Kabupaten Nganjuk yang fokus pada penyusunan RKPD juga hanya mengkaji efektivitas SIPD pada tahap perencanaan, sementara penelitian ini memperluas cakupan hingga proses penganggaran formal dengan tantangan politik, teknis, dan administratif yang lebih kompleks.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada konteks lokus penelitian (Kabupaten Lembata sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur), kedalaman teori yang digunakan, cakupan implementasi yang lebih luas, serta pendekatan analitis terhadap keberhasilan sistem berbasis teori *e-government* yang belum banyak diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya..

I.5 Tujuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, beberapa tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD dikabupaten lembata
2. Untuk Mengetahui Hambatan – Hambatan dalam penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata
3. Untuk Mengetahui Upaya apakah yang dilakukan pemerintah kabupaten lembata dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam menyusun APBD menggunakan SIPD

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan melihat peristiwa, menganalisis peristiwa yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode penelitian kualitatif. Hal bertujuan untuk memahami dengan baik mengenai metode penelitian yang tepat dengan langkah-langkah yang tepat dalam proses penelitian berlangsung (Nurdin & Hartati, 2019).

Metode penelitian yang digunakan merupakan salah satu aspek yang krusial dimana memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data. Karena, data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah representasi dari objek

yang diteliti, untuk itu penelitian dengan metode yang tepat akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas data yang diperoleh (Nurdin & Hartati, 2019)

Penulis melaksanakan penelitian kualitatif dengan didasarkan pada pendapat Simangunsong (2017) dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mempunyai bentuk desain yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk penelitian kualitatif yang mempunyai sifat emergent yaitu fenomena-fenomena muncul tiba-tiba dengan prinsip alami. Simangunsong (2017) juga menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang terdapat dalam transkrip.

Menurut Sugiyono (2022) Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, berbeda dengan eksperimen yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data adalah triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dan generalisasi.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Basrowi, 2008). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 Narasumber yang terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPELITBANGDA Kabupaten Lembata, Kepala Bidang Penganggaran BKAD kabupaten Lembata, Operator/Staf SIPD BAPELITBANGDA Kabupaten Lembata, Operator/Staf SIPD BKAD Kabupaten Lembata

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD di kabupaten lembata. Peneliti menggunakan Teori Implementasi dari Richardus Eko Indrajit (2016) yang terdapat 3 dimensi sebagai berikut :

1. Elemen *Support* (Pendukung)
2. Elemen *Capacity* (Kapasitas)
3. Elemen *Value* (Manfaat)

3.1. Penerapan SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata

Dalam penerapan SIPD sebagai alat penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lembata, sesuai dengan Teori yang dikemukakan Oleh Richardus Eko Indrajit (2016) yang memiliki 3 dimensi utama yakni Elemen *Support*, Elemen *Capacity*, dan Elemen *Value* sebagai berikut:

1. Elemen *Support* (Pendukung)

Menurut Richardus Eko Indrajit (2016), Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government.

a. Terdapatnya Kemampuan Organisasi dalam Memanfaatkan Input

Dalam sebuah organisasi, keterampilan dalam mengelola dan memanfaatkan input menjadi elemen penting yang berpengaruh dalam mencapai tujuan. Input yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, teknologi, data, serta berbagai informasi yang mendukung operasional organisasi. Kemampuan organisasi dalam mengolah input ini tidak hanya menunjukkan sejauh mana organisasi dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem, tetapi juga mencerminkan kemampuannya dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh hasil yang optimal.

b. Kebijakan atau Aturan yang mengatur Implementasi E-Government

Kebijakan dan regulasi yang mengatur penerapan e-government, khususnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), memiliki peran penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. SIPD merupakan bagian dari inisiatif digitalisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi data, mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, serta memastikan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SIPD didasarkan pada berbagai regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Selain itu, regulasi lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, yang menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem ini. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan setiap daerah dapat menerapkan SIPD secara optimal untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

- c. Adanya Kemampuan Organisasi dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Suatu Sistem
Dalam penerapan suatu sistem, kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem tersebut. Hal ini juga berlaku dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata. Sosialisasi yang efektif menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik dari jajaran pemerintah daerah memiliki pemahaman yang cukup mengenai fungsi, manfaat, serta tata cara penggunaan sistem ini. Sebagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, SIPD memerlukan dukungan penuh dari seluruh aparatur pemerintahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lembata dituntut untuk memiliki strategi sosialisasi yang komprehensif, termasuk melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan bagi pengguna sistem. Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan setiap pegawai dapat memahami dan mengoperasikan SIPD secara optimal, sehingga proses penyusunan APBD dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

2. Elemen *Capacity*

Menurut Richardus Eko Indrajit (2016), Elemen kedua yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait menjadi kenyataan.

- a. Ketersediaan Sumber Daya Finansial Yang Memadai

Ketersediaan sumber daya finansial yang mencukupi menjadi aspek penting dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. Dengan dukungan dana yang memadai, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan implementasi SIPD sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat berlangsung lebih transparan, tepat, dan efisien guna menunjang pembangunan daerah. Selain itu, kecukupan sumber daya finansial juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta keberlanjutan pemeliharaan sistem, sehingga operasional SIPD dapat berjalan secara efektif. Hal ini akan berkontribusi pada tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dapat dikatakan bahwa sumberdaya finansial dalam menopang kebutuhan daerah terkait sarpras dan honor pegawai masih minim, sehingga ini bisa menjadi perhatian khusus Pemerintah daerah kabupaten lembata dalam mengelola sumber daya finansial nya, karna sangat berpengaruh terhadap kinerja

pegawai dan output yang dihasilkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

b. Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai

Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi aspek krusial dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. Infrastruktur yang meliputi konektivitas internet yang stabil, perangkat teknologi yang memadai, serta sistem pendukung yang andal merupakan syarat utama agar penerapan SIPD dapat berjalan dengan optimal. Dengan infrastruktur yang baik, proses perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akurat.

Selain itu, infrastruktur yang memadai juga mendukung peningkatan akses terhadap data, mempercepat pemrosesan informasi, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi canggih, potensi kesalahan dalam penyusunan APBD dapat diminimalkan, sementara efisiensi dalam distribusi anggaran dapat ditingkatkan.

Lebih lanjut, dukungan infrastruktur yang memadai memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antar perangkat daerah, memastikan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan SIPD yang didukung oleh infrastruktur yang kokoh tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, tetapi juga mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat..

c. Kemampuan Sumber Daya Manusia Yang Mencukupi

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata. SDM yang memiliki kompetensi serta pemahaman yang baik terhadap sistem akan memastikan bahwa seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata pada bagian penganggaran serta di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lembata pada bagian perencanaan, diperlukan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan SIPD. Dengan penguasaan sistem yang baik, pegawai di kedua instansi ini dapat mengolah serta menganalisis data secara lebih efektif, sehingga perencanaan dapat lebih terarah dan penganggaran lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis sangat diperlukan agar setiap fitur dalam SIPD dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya pembekalan yang cukup, pegawai di BKAD dan Bapelitbangda akan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan mampu mengatasi berbagai kendala teknis dalam sistem. Tak hanya itu, koordinasi antara tim perencanaan di Bapelitbangda dan tim penganggaran di BKAD juga perlu diperkuat agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih selaras dan terintegrasi.

Dengan SDM yang kompeten dan terampil, implementasi SIPD akan semakin meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga akan memperkuat efektivitas pembangunan yang berbasis data serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM di kedua instansi tersebut menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lembata.

3. Elemen *Value*

Menurut Richardus Eko Indrajit (2016), Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri,

melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government..

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata memberikan berbagai keuntungan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, SIPD memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terbuka, efisien, serta berbasis data yang akurat. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dalam pengalokasian anggaran dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, koordinasi antarperangkat daerah dapat berjalan lebih optimal, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang didanai benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Selain itu, penggunaan SIPD juga mempercepat proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan SIPD, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara terstruktur serta berbasis data yang valid, sehingga memastikan alokasi anggaran lebih tepat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, keberadaan SIPD memudahkan koordinasi antarperangkat daerah, memungkinkan sinkronisasi program dan kegiatan secara lebih optimal, serta mempercepat proses verifikasi dan pelaporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan APBD, meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, SIPD menjadi sarana strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kabupaten Lembata telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lembata. Hal ini memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, dengan adanya transparansi yang lebih baik, warga Kabupaten Lembata dapat ikut serta dalam mengawasi kebijakan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini SIPD sangat memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat karena semua program kegiatan yang bertujuan bagi Masyarakat dapat dengan mudah di susun dan di jalankan melalui sistem ini, sehingga SIPD dinilai sangat efektif dalam memberikan manfaat bagi Pembangunan daerah untuk kesejahteraan bagi Masyarakat.

3.2. Hambatan – Hambatan penerapan SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lembata

Dalam penerapan SIPD di kabupaten Lembata dalam hal penyusunan APBD tidak selalu berjalan dengan mulus, ada beberapa hambatan atau tantangann dalam pengoperasian SIPD tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan di lokasi, ditemukan terdapat beberapa hambatan dalam penerapan SIPD, ada pun tantangan nya sebagai berikut :

1. F sumber Daya Manusia

Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tet api juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya. SDM yang kompeten dan memahami sistem ini dengan baik akan memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan APBD berjalan efektif, efisien, dan akurat. Tanpa SDM yang memadai, pemanfaatan SIPD dapat terhambat, mulai dari kesalahan input data, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, hingga ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diterapkan sejak tahun 2020 dan telah dijalankan di Kabupaten Lembata selama kurang lebih lima tahun, namun hingga saat ini masih ditemukan berbagai kendala signifikan dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Hal ini menunjukkan bahwa durasi penerapan yang cukup lama belum secara otomatis diiringi dengan peningkatan kapasitas organisasi, khususnya dalam kesiapan dan pengelolaan SDM. Salah satu penyebab utama berlanjutnya kendala SDM adalah minimnya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan SIPD yang diberikan pada awal penerapan bersifat terbatas, hanya menysar sebagian kecil pegawai, dan lebih berfokus pada pengenalan teknis aplikasi, bukan pada pemahaman sistemik mengenai integrasi perencanaan dan penganggaran. Tidak ada mekanisme pelatihan tahunan atau sistem pembelajaran berjenjang yang disesuaikan dengan perubahan atau pembaruan sistem SIPD dari Kemendagri. Selain itu, tingginya ketergantungan pada operator tertentu juga menjadi hambatan serius. Di banyak OPD hanya satu atau dua orang yang dianggap "menguasai SIPD". Ketika personel tersebut berhalangan, pensiun, atau mutasi, maka kemampuan OPD tersebut untuk menjalankan tugas perencanaan dan penganggaran menjadi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan dan sistem kaderisasi belum berjalan optimal.

Faktor lain adalah rendahnya insentif dan perhatian terhadap peran strategis operator SIPD. Banyak pegawai yang mengoperasikan SIPD merasa tugas tersebut adalah beban tambahan yang tidak diimbangi dengan penghargaan atau pengakuan formal. Padahal, peran mereka sangat penting dalam menjamin kelancaran proses input data, konsistensi program, dan akurasi anggaran. Di sisi manajemen, tidak adanya strategi pengembangan SDM yang berbasis kebutuhan implementasi SIPD menjadi akar masalah. Pemerintah daerah cenderung menempatkan SIPD sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai sistem strategis yang memerlukan investasi kapasitas manusia secara serius. Akibatnya, perencanaan penguatan SDM untuk mendukung SIPD tidak menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah (misalnya dalam Renstra atau Renja OPD). Selain itu, perubahan regulasi dan fitur teknis SIPD yang sering terjadi juga menyulitkan pegawai untuk mengikuti perkembangan sistem. Tanpa adanya pelatihan yang responsif terhadap pembaruan tersebut, pegawai di daerah cenderung bekerja secara trial and error, yang memperlambat proses kerja dan meningkatkan risiko kesalahan input.

Penggunaan akun SIPD di SKPD masih belum berjalan optimal karena kurangnya keterlibatan pejabat teknis dalam proses penginputan anggaran. Seharusnya, setiap Kepala Bidang atau PPTK bertanggung jawab langsung dalam melakukan penginputan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, dalam praktiknya, banyak SKPD yang sepenuhnya menyerahkan tugas ini kepada bagian perencanaan, sehingga terjadi beban kerja yang tidak merata dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pemilihan kode rekening. Dampak dari kondisi ini

adalah operator SIPD di SKPD harus menangani tiga akun sekaligus, yaitu akun Pengguna Anggaran (PA), PPTK, dan Perencana. Beban yang berlebihan ini menyebabkan kurangnya akurasi dalam penginputan, sehingga kesalahan dalam pemilihan kode rekening masih sering terjadi. Kesalahan ini dapat berpengaruh pada ketidaktepatan alokasi anggaran, yang meskipun tidak berdampak langsung pada opini WTP, tetap berpotensi menjadi temuan dalam audit keuangan.

Dan juga Salah satu permasalahan yang cukup menonjol dalam implementasi SIPD di Kabupaten Lembata adalah masih rendahnya kepatuhan SKPD terhadap ketentuan sumber dana dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Ketidaktaatan ini mencerminkan lemahnya pemahaman serta konsistensi dalam mengelola proses penganggaran sesuai dengan regulasi dan struktur pendanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAPELITBANGDA dan BKAD, ditemukan bahwa banyak SKPD tidak secara konsisten mencantumkan sumber dana yang sesuai dengan klasifikasi belanja, meskipun sistem SIPD telah menyediakan menu dan kolom sumber dana secara spesifik. Sebagai contoh, terdapat program atau kegiatan yang seharusnya didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Transfer Khusus lainnya, namun justru dicantumkan menggunakan sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kemampuan riil pendanaan, serta menyulitkan proses verifikasi dan sinkronisasi dokumen anggaran oleh BKAD.

Ketidaktaatan ini juga disebabkan oleh minimnya pemahaman teknis operator atau penyusun RKA di tingkat SKPD terhadap struktur pendanaan. Banyak staf teknis belum memahami bahwa setiap jenis belanja wajib disesuaikan dengan jenis sumber dana tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri tentang SIPD. Mereka lebih berfokus pada penyusunan rincian kegiatan, tanpa memperhatikan kesesuaian pendanaannya. Selain itu, tidak semua SKPD memiliki akses atau pemahaman atas informasi pagu per sumber dana. Informasi pagu yang diberikan oleh TAPD seringkali belum ditindaklanjuti dengan pendampingan yang kuat dalam menyusun RKA secara teknis. Akibatnya, SKPD menginput kegiatan dengan sumber dana yang tidak akurat, baik karena ketidaktahuan atau karena ingin menyesuaikan program dengan pagu yang tersedia tanpa memperhatikan asal dana sebenarnya. Dari sisi sistem, meskipun SIPD memiliki fitur kontrol sumber dana, namun dalam praktiknya belum semua mekanisme validasi dijalankan secara ketat. Ini memungkinkan adanya fleksibilitas atau "kelonggaran" dalam memilih sumber dana yang tidak sesuai, selama kegiatan tetap bisa diinput dan diakui sistem. Kondisi ini memperburuk kualitas dokumen RKA yang dihasilkan, dan berpotensi menimbulkan masalah dalam evaluasi APBD, baik di tingkat daerah

2. Pokok Pikiran (POKIR) Yang Tidak Melalui SIPD

Salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Seharusnya, Pokir yang berasal dari aspirasi masyarakat disampaikan terlebih dahulu melalui SKPD terkait, sehingga dapat diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah sebelum masuk ke dalam perencanaan di Bappeda. Namun, dalam praktiknya, Pokir sering kali diajukan langsung ke Bappeda tanpa melalui SKPD, yang mengakibatkan kurangnya optimalisasi dalam perencanaan anggaran. Ketidakteraturan dalam mekanisme ini berdampak pada minimnya keterpaduan antara Pokir DPRD dengan program serta kebutuhan pembangunan daerah yang telah dirancang oleh SKPD. Akibatnya, alokasi

dana perencanaan dari DPRD tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena tidak terhubung langsung dengan program prioritas SKPD. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran, sebab Pokir yang tidak melewati SKPD berisiko tumpang tindih dengan program lain atau sulit direalisasikan karena kendala teknis dan regulasi.

Pokok pikiran atau POKIR yang dimiliki DPRD belum di gunakan dan dimanfaatkan secara efektif, yang berakibat pada penerapan SIPD yang tidak maksimal pada pemerintah daerah kabupaten Lembata. implikasinya terhadap SIPD adalah anggota DPRD tidak menggunakan pokir dengan tepat sasaran, yaitu pokir yang harusnya di laporkan terdahulu kepada OPD agar Ketika penyusunan RKS – SKPD, Rancangan yang dibuat masing – masing OPD dapat disesuaikan dengan pokir, akan tetapi DPRD memasukan langsung pokir ke bagian perencanaan di Bapelitbangda sehingga Ketika perencanaan anggaran dari masing – masing OPD di serahkan kepada Bapelitbangda ditemukan ketidak sesuaian dari pokir dan RKA – SKPD sehingga menambah waktu dalam memverifikasi RKA – SKPD.

3. Manajemen Waktu Yang Tidak Efisien

Proses penyusunan APBD menuntut ketepatan dan kecepatan dalam penginputan data, terutama dalam kondisi waktu yang terbatas. Bidang penganggaran menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh data tersusun secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang optimal, komitmen tinggi, serta dukungan teknologi agar setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas perencanaan anggaran.

Keterbatasan waktu dalam penginputan anggaran, yang hanya berlangsung selama satu minggu sebelum penetapan KUA-PPAS, menjadi tantangan bagi bidang penganggaran. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam penyelesaian RKPD, yang seharusnya dapat dirampungkan pada Mei atau awal Juni, namun kerap kali tertunda hingga akhir Juni. Akibatnya, proses penganggaran harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih optimal antar sektor terkait agar tahapan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

4. Infrastruktur Yang Kurang Memadai

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memainkan peran penting dalam penyusunan APBD guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, di Kabupaten Lembata, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dalam pengoperasian sistem ini. Masalah seperti jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan kapasitas perangkat, serta minimnya dukungan teknis sering kali menghambat proses input dan pengolahan data anggaran.

keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengoperasian SIPD di Kabupaten Lembata, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran. Kabid Perencanaan Bapelitbangda menekankan bahwa koneksi internet yang kurang stabil, keterbatasan perangkat, serta minimnya dukungan teknis menjadi faktor penghambat dalam penyusunan APBD. Sementara itu, Kabid Penganggaran menjelaskan bahwa karena fasilitas dari Pemda sering mengalami kendala teknis, pegawai akhirnya lebih memilih menggunakan perangkat pribadi agar pekerjaan tidak terganggu. Selain itu, banyak OPD juga menghadapi kesulitan dalam menginput Renja ke dalam SIPD akibat belum tersedianya sarana pendukung seperti jaringan WiFi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur dan dukungan teknologi agar sistem dapat berjalan dengan lebih optimal tanpa menghambat kinerja aparatur pemerintah daerah.

3.3. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten lembata dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam menyusun APBD menggunakan SIPD

Langkah – langkah yang dilakukan oleh BKAD kabupaten Lembata serta Bapelitbangda kabupaten Lembata adalah :

1. Bkad kabupaten Lembata dan Bapelitbangda kabupaten Lembata telah berkolaborasi untuk mengarahkan operator SIPD di tiap – tiap SKPD agar tidak melakukan kesalahan penginputan, serta meminta PUSDATIN untuk melakukan pendampingan sipd terkait penggunaan akun – akun dalam penganggaran, dan juga telah mengajukan ke Bupati untuk mengadakan pelatihan penggunaan SIPD
2. BKAD dan Bapelitbangda Kabupaten Lembata mengadakan pelatihan berkala dengan inisiatif sendiri bagi Kepala Bidang, PPTK, dan staf perencana di SKPD agar mereka dapat memahami tata cara penginputan SIPD secara mandiri. Fokus pelatihan mencakup pemahaman struktur kegiatan, pemilihan kode rekening yang tepat, serta prosedur teknis lainnya. Hal ini sama dengan peneliti temukan pada penelitian terdahulu oleh (Setiadi, 2022) yaitu Tim TAPD Pemerintah Kota Bandung melakukan sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendampingan pada perangkat daerah dalam menyusun rencana anggaran daerahnya dengan menggunakan SIPD.
3. BKAD dan Bapelitbangda kabupaten Lembata menginisiasi forum rutin antara DPRD, SKPD, dan tim perencana daerah untuk membahas usulan Pokir sebelum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. BKAD dan Bapelitbangda kabupaten Lembata menyelenggarakan pelatihan khusus secara inisiatif tanpa anggaran dari Pemda kabupaten Lembata dan dilakukan oleh pegawai perencanaan dan penganggaran bagi operator perencanaan dan keuangan di SKPD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan sumber dana yang sesuai aturan.
5. BKAD dan Bapelitbangda Kupaten Lembata menetapkan timeline yang lebih ketat untuk setiap tahapan penyusunan RKPD, mulai dari perencanaan awal, konsultasi publik, hingga finalisasi. Jadwal ini harus dibuat lebih awal dan disosialisasikan kepada seluruh SKPD agar mereka dapat menyesuaikan proses perencanaannya.
6. Pemda Lembata bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas jaringan di seluruh OPD, termasuk di wilayah yang masih mengalami kendala konektivitas, serta Pemerintah daerah kabupaten Lembata menambah dan memperbarui perangkat komputer dan laptop yang digunakan dalam pengoperasian SIPD, terutama bagi OPD yang masih menggunakan perangkat pribadi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Novianta (2021) yang judul “Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.” Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan SIPD digunakan dalam proses penyusunan dokumen anggaran di lingkup Pemerintah Kota Jambi. Penelitian tersebut mengkaji aspek-aspek teknis administratif penyusunan APBD dan pembiayaan daerah berdasarkan regulasi, seperti Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal ini, SIPD dipandang sebagai alat bantu dalam proses penginputan data dan penyusunan anggaran, dan belum menyentuh secara mendalam aspek keberhasilan implementasi maupun kendala substantif yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama amengkaji mengenai Implementasi penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD sedagkan perbedaan yang ada adalah peneliti menggunakan teori implementasi yang idkemukakan oleh Indrajit (2016) yang memiliki 3 dimensi utama yakni Elemen Support (Pendukung), Elemen Capacity (Kapasitas), dan Elemen Value (Manfaat).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” menitikberatkan pada proses implementasi SIPD dari sisi teknis dan administratif. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana sistem SIPD diterapkan dalam lingkup pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga penginputan anggaran daerah, serta melihat kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan SDM, dan adaptasi terhadap regulasi yang terus diperbarui. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif tanpa landasan teori implementasi tertentu, dan lebih banyak mengkaji bagaimana pelaksanaan sistem SIPD berjalan di lingkungan kerja birokrasi perkotaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mendeskripsikan penerapan SIPD, tetapi juga menganalisis tingkat keberhasilannya melalui pendekatan teoritis dari Harvard JFK School of Government. Teori tersebut menekankan tiga elemen utama, yakni support (dukungan politik dan kebijakan), capacity (kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur), serta value (manfaat dan nilai tambah sistem terhadap tata kelola anggaran). Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih sistematis dan mendalam dalam mengevaluasi SIPD sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Sanny, Muhammad Hatta, Dayu Suhardi (2023) berjudul “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Penyusunan Anggaran di Kota Parepare” secara khusus mengkaji sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, maupun komitmen organisasi, dalam mengimplementasikan SIPD dalam penyusunan anggaran daerah. Penelitian ini berfokus pada tahap awal penerapan SIPD dan menggunakan pendekatan analisis kesiapan (readiness analysis) sebagai kerangka evaluatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kelancaran integrasi SIPD ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada tahap yang dikaji. Dimana Penelitian di Kota Parepare lebih bersifat pre-implementation atau persiapan awal, sementara penelitian yang peneliti lakukan bersifat post-implementation, yaitu menelaah sistem yang sudah diterapkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih terbatas dibandingkan Kota Parepare, sehingga memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana SIPD dapat dioptimalkan di daerah dengan sumber daya minimal. Persamaannya masih sama-sama mengkaji mengenai penerapan SIPD dalam penyusunan APBD.

Penelitian oleh Ade Ridwan Setiadi (2022) berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perencanaan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kota Bandung” dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menelaah bagaimana penerapan SIPD dalam menyusun perencanaan anggaran pada salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini mengkaji aspek teknis pelaksanaan SIPD dalam satu unit organisasi, khususnya terkait proses perencanaan program dan penginputan data ke dalam sistem. Penekanannya terletak pada bagaimana perangkat daerah memahami, mengoperasikan, dan menyesuaikan diri dengan sistem SIPD dalam lingkup mikro (unit dinas), serta hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan penyesuaian nomenklatur program. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengambil lingkup yang lebih luas, yakni pada level kabupaten secara keseluruhan, dengan melibatkan lebih dari satu perangkat daerah yang berperan strategis dalam perencanaan dan penganggaran, seperti Bappelitbangda dan BKAD. Penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya melihat implementasi teknis SIPD, tetapi juga menganalisis keberhasilannya menggunakan teori dari Harvard JFK School of Government yang mencakup aspek support, capacity, dan value. Fokusnya tidak terbatas pada satu OPD, tetapi mencakup sinergi antarlembaga dalam menyusun dokumen KUA/PPAS hingga RAPBD secara

terpadu melalui SIPD. Walaupun memiliki kesamaan yakni meneliti terkait penerapan SIPD dalam penyusunan Anggaran Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra (2021) di Kabupaten Nganjuk dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD” berfokus pada sejauh mana SIPD mampu mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara efektif. Penelitian ini menekankan aspek efektivitas sistem, seperti ketepatan waktu penyusunan, kemudahan akses data, integrasi antarsektor, serta kemampuan SIPD dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini melihat SIPD sebagai alat bantu teknis dalam proses perencanaan tahunan pemerintah daerah, dan cenderung menggunakan pendekatan evaluatif terhadap kualitas output perencanaan melalui SIPD. Perbedaan utama antara ini dan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek yang dikaji (RKPD vs APBD), tahapan sistem (perencanaan vs penganggaran), serta kedalaman teoritis. Penelitian di Kabupaten Nganjuk bersifat evaluatif terhadap satu fase (penyusunan RKPD), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bersifat analitis-strategis terhadap fase lanjutan yang lebih kompleks, yaitu penganggaran. Selain itu, konteks wilayah juga memberikan perbedaan penting: Lembata sebagai daerah dengan keterbatasan infrastruktur memberikan tantangan berbeda dibandingkan Nganjuk yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan SDM. Oleh karena itu, penelitian yang peneliti lakukan menawarkan kontribusi yang lebih strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah secara digital di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Walau memiliki kesamaan yang cukup identik yakni meneliti terkait penerapan SIPD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lembata merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. SIPD telah digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran, namun implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Permasalahan utama yang muncul antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan infrastruktur, serta mekanisme input data yang belum optimal. Penggunaan akun SIPD yang terpusat pada satu operator, ketidakteraturan dalam mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, dan kepatuhan SKPD terhadap sumber dana yang rendah menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengambil berbagai langkah seperti menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi operator SIPD, meningkatkan kerja sama dengan PUSDATIN Kemendagri, serta memperbaiki infrastruktur jaringan melalui kolaborasi dengan penyedia layanan internet. Di samping itu, pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor antara DPRD, SKPD, dan tim perencana daerah untuk menyinkronkan Pokir dengan dokumen perencanaan, serta menyusun jadwal kerja yang lebih terstruktur guna menghindari keterlambatan dan tekanan waktu dalam penginputan data anggaran.

Manfaat dari penerapan SIPD dirasakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, SIPD mempercepat proses verifikasi dan pelaporan, mempermudah integrasi data antar-OPD, dan mendorong sistem kerja yang lebih efisien dan transparan. Bagi masyarakat, SIPD memberikan jaminan bahwa anggaran publik dikelola secara lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, serta memberikan peluang partisipasi dalam pengawasan anggaran daerah melalui akses terhadap informasi yang lebih terbuka.

Dengan demikian, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan administratif, penerapan SIPD di Kabupaten Lembata telah memberikan fondasi yang baik bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah. Ke depan, dibutuhkan penguatan lebih lanjut terhadap kapasitas SDM, penyesuaian

infrastruktur, dan optimalisasi regulasi agar SIPD dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai ruang pengembangan untuk studi selanjutnya. Pertama, pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan temuan yang bersifat naratif dan kontekstual, sehingga kurang mampu mengukur secara kuantitatif efektivitas penerapan SIPD, seperti efisiensi waktu, penurunan kesalahan input, maupun peningkatan kecepatan proses anggaran sebelum dan sesudah implementasi. Kedua, penelitian hanya dilakukan pada dua perangkat daerah utama, yaitu BAPELITBANGDA dan BKAD Kabupaten Lembata, dengan jumlah informan terbatas yang dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Hal ini menyebabkan sudut pandang lebih dominan dari sisi kelembagaan teknis dan belum mencakup pandangan OPD pengguna SIPD lain, legislatif (DPRD), serta masyarakat sebagai penerima manfaat transparansi penganggaran, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh sistem penganggaran daerah. Selain itu, fokus penelitian hanya pada Kabupaten Lembata tanpa perbandingan dengan daerah lain yang memiliki kondisi infrastruktur, kapasitas SDM, dan tingkat komitmen berbeda dalam penerapan SIPD. Akibatnya, ruang lingkup analisis masih terbatas pada konteks lokal tersebut dan belum mampu menjelaskan pola keberhasilan maupun kegagalan implementasi SIPD secara komprehensif. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan multidimensi untuk memperoleh gambaran lebih menyeluruh serta memperkuat validitas temuan di masa depan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara komparatif di beberapa daerah lain agar dapat menggambarkan penerapan SIPD secara lebih luas dan mendalam. Perbandingan antar daerah akan membantu mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun hambatan yang khas, sehingga hasil penelitian dapat lebih aplikatif secara nasional. Selain itu, pendekatan kuantitatif dapat ditambahkan untuk mengukur efektivitas SIPD secara lebih objektif, misalnya melalui analisis kepuasan pengguna, efisiensi waktu penyusunan APBD, atau peningkatan skor MCP. Integrasi metode ini akan memperkuat validitas temuan dan memberikan gambaran yang lebih lengkap. Penelitian ke depan juga dapat fokus pada evaluasi kesiapan digital pemerintah daerah, termasuk kebijakan pendukung, kapasitas SDM, dan infrastruktur. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata terkhususnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, yang telah memberikan informasi terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam hal ini adalah Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Lembata, serta kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Sanny, Muhammad Hatta, & Dayu Suhardi. (2023). ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN DI KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i1.2277>
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Pertama). PT RINEKA CIPTA.
- Dirgahayu, I., Supriyono, B., Domai, T., & Saleh, C. (2025). Improving the quality of the regional revenue and expenditure budget using discourse network analysis. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 15(2), 227–242. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2025.144430>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>
- Hartati, Satoto, S., Dewi, R., & Diar, A. (2025). Illegal levies in education funding in Indonesia: an analysis of experiences from Jambi Province. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2450293>
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government* (Vol. 84). https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
- Nasution, I. K., Kusmanto, H., Ardian, M., Nasution, F. A., & Indainanto, Y. I. (2024). Executive Political Communication in Drafting Regional Revenue and Expenditure Budgets in North Sumatra Province, Indonesia. *WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, 20, 76–86. <https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.9>
- Nasution, M. I., & Nurwani, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109116. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>
- Novianta. (2021). *IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI*. Universitas Jambi.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI%20BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20SOSIAL.pdf>
- Riauan, M. Ar. I., Cahyono, N. D., & A. Manaf, A. M. (2022). Communication Patterns on Implementation of E-Planning in Rokan Hilir Regency. *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*, 4(1), 522–531. <https://doi.org/10.37385/jaets.v4i1.1366>
- Selvia, H. R. D., Azhari, A. F., Enggarani, N. S., & Budiono, A. (2024). The preparation of the budget planning of the Rembang regency local government. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 3578–3588. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2773>
- Setiadi, A. R. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG (Lokus Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung)* [Universitas Widyatama]. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/15185>

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif* (Edisi Kedua). CV. ALfabet.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). CV. ALfabet.

Yamin, N. Y., Lawaidjo, M. R., & . R. (2025). Moderation of Human Resource Competencies in Quality of Financial Statements: Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, and Control Environment. *Journal of Ecohumanism*, 4(1). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5968>

